

GLOBALIZATION CHALLENGE AND STRATEGY OF INCREASING TAX TO FACE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Ade Manggala Hardianto

Abstrack

ASEAN as region organization considers the important of regional integration. In accordance with this, ASEAN representatives have create the ASEAN VISION 2020, which is based on three principles, political, economic and social culture.

Globalization is the biggest challenge for every nation that needs to be anticipated, there are 10 (ten) challenge that Indonesia has to face, such as economis globalization, unemployment, social responsibility, environment preservation, living standar improvement, etcnic and moral norms implementations, labour diversity, demography configuration, scinence and technologi and political challenge.

Therefore, the strategy to improve the is by expanding the receipt base, strengthening the collection process, improving the capacity of local income, improving of supervising process, improving the receipt capacity through better planning, improving the countinousness of tax or retribution payer and mapping the receipt potention.

Keywords : challenge, globalization and strategy

ASEAN sebagai sebuah organisasi regional menyadari pentingnya suatu integrasi kawasan. Sejalan dengan hal tersebut, para wakil ASEAN membuat *ASEAN Visions 2020* yang berdasar pada tiga pilar yaitu keamanan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Terdapat tiga komunitas dalam *ASEAN Community* yang sesuai dengan tiga pilar dari *ASEAN Vision 2020*, yaitu pada bidang keamanan politik (*ASEAN Political-Security Community*), ekonomi (*ASEAN Economic Community*), dan sosial budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*)

Globalisasi merupakan tantangan terbesar bagi semua Negara, dan diperlukan memperhitungkan tantangan tersebut. Ada 10 tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia Tantangan globalisasi ekonomi, Pengangguran Tanggungjawab social, Pelestarian lingkungan hidup, Peningkatan mutu hidup,Penerapan norma-norma moral dan etika Keanekaragaman tenaga kerja Konfigurasi demografi, Penguasaan dan pemanfaatan iptek dan tantangan bidang politik

Adapun strategi peningkatan pajak daerah dengan cara memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, peningkatan kapasitas

pengelola penerimaan daerah, meningkatkan pengawasan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi, dan memetakan potensi penerimaan.

Keyword : Tantangan, Globalisasi, Strategi Pendapatan Daerah

I. Pendahuluan

Globalisasi merupakan kontak yang lebih erat antara berbagai pelosok dunia, meningkatnya interaksi personal, saling kerjasama dan persahabatan antara penduduk dunia atau sebagai globalisasi ekonomi yang berarti meningkatnya pelaku ekonomi diberbagai Negara.

Globalisasi menurut beberapa ahli seperti Malcon Waters adalah sebuah proses social yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan social budaya kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang. Menurut Emmanuel Richer jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam, saling ketergantungan dan persatuan dunia. Menurut Thomas L. Friedman globalisasi memiliki ideology dan teknologi. Dimensi ideology yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Menurut Princeton N. Lyman adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara Negara – Negara di dunia dalam hal ini perdagangan dan keuangan.

Fenomena globalisasi yang terjadi berpengaruh pada keadaan. pertama : arus etnis ditandai dengan mobilitas manusia yang tinggi dalam bentuk imigran, turis, pengungsi, tenaga kerja dan pendatang. Kedua arus teknologi ditandai dengan mobilitas teknologi, munculnya multinational corporation, dan transnasional corporation yang kegiatannya dapat menembus batas-batas Negara. Ketiga arus keuangan ditandai dengan tingginya mobilitas modal, investasi pembelian melalui internet, penyimpanan uang di bank asing. Keempat arus media ditandai dengan makin kuatnya mobilitas informasi, baik melalui media cetak, maupun elektronik. Kelima arus ide ditandai dengan makin derasnya nilai baru yang masuk ke Negara. Dalam arus ide ini muncul isu-isu yang telah menjadi bagian dari masyarakat internasional. Isu ini merupakan isu internasional yang berlaku di suatu wilayah nasional Negara.

Dampak globalisasi secara positif adalah kemajuan teknologi informasi mempermudah manusia berinteraksi, peluang yang lebih luas bagi manusia berbagai etnik, bangsa, budaya dan agama untuk berinteraksi. Dampak negative dari globalisasi adalah masuknya nilai budaya luar akan menghilangkan nilai-nilai tradisi suatu bangsa dan identitas suatu bangsa, eksploitasi alam dan sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan semakin besar, berkembang nilai-nilai konsumerisme dan individual yang menggeser nilai-nilai social masyarakat, terjadi dehumanisasi yaitu derajat manusia tidak lagi dihargai karena lebih banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. Timbulnya dominasi Negara-negara maju yang

mempunyai kekuatan yang lebih kuat, masyarakat yang terbentuk tidak lebih kreatif, kurang bersemangat dan berwatak hedonistic.

ASEAN sebagai sebuah organisasi regional menyadari pentingnya suatu integrasi kawasan. Sejalan dengan hal tersebut, para wakil ASEAN membuat *ASEAN Visions 2020* yang berdasar pada tiga pilar yaitu keamanan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Pada KTT ASEAN ke 9 di Bali pada tahun 2003 yang kemudian menghasilkan *Bali Concord II*, terjadi pembentukan *ASEAN Community* yang mana *ASEAN Community* ini merupakan sebuah upaya untuk mempererat integrasi ASEAN. Terdapat tiga komunitas dalam *ASEAN Community* yang sesuai dengan tiga pilar dari *ASEAN Vision 2020*, yaitu pada bidang keamanan politik (*ASEAN Political-Security Community*), ekonomi (*ASEAN Economic Community*), dan sosial budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*).

Dari ketiga komunitas yang telah terbentuk tersebut kita akan berfokus pada *ASEAN Economic Community* (AEC) yang merupakan pilar terjadinya integrasi ekonomi di ASEAN. AEC bertujuan untuk membangun kemitraan untuk kemajuan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan warga ASEAN dengan tercapainya integrasi regional yang melalui upaya kolektif masyarakat ASEAN.

Untuk membantu tercapainya integrasi ekonomi ASEAN melalui AEC, maka dibuatlah *AEC Blueprint*. *AEC Blueprint* memuat empat pilar utama yaitu (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang di dukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas, (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*, (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam, dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Dengan adanya *AEC Blueprint* tersebut maka, negara-negara anggota ASEAN mulai menyesuaikan ekonomi dan pasar mereka untuk tercapainya AEC pada 2015 nanti. Selain itu perusahaan-perusahaan juga mulai mengubah strategi atau menyesuaikan strategi mereka untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kuat, bukan hanya dari sesama anggota ASEAN tetapi juga dari pihak luar ASEAN.

II. Kajian Dan Analisa Masalah

Tantangan globalisasi yang akan dihadapi oleh Negara ASEAN adalah

1. **Globalisasi dalam bidang ekonomi.** Yaitu perusahaan memproduksi di berbagai Negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah, mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua Negara di dunia. Penurunan dan penyeragaman tariff serta penghapusan berbagai hambatan non tariff dan masyarakat suatu Negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari Negara- Negara di dunia karena kemajuan Teknologi. Globalisasi ekonomi dalam sudut tingkat perekonomian memunculkan kategorisasi negara-negara bangsa, yaitu : Negara-negara Industri Maju , Negara industri baru (newly industrilizing coutries), dan Negara-negara sedang membangun, terbelakang (developed coutries)

Table 1
Globalisasi Ekonomi Negara ASEAN

NEGARA	1998-1999	2000-2007	2008-2009	2010	2011	2012	2013	Q1 2014	Q2 2014
	Era Krisis	Era Tumbuh	Era Krisis						
	Asia	Stabil	Global						
Brunei Darussalam	1,25	2,24	-1,85	2,6	2,2	1,6	-1,8	-3,3	2
Kamboja	8,5	9,93	3,4	6,1	7,1	7,2	7,3	7,2	not available
Indonesia	-6,15	5,04	5,3	6,2	6,5	6,2	5,78	5,21	5,12
Laos	4,25	6,75	7,65	8,1	8	8,1	7,9	7,6	not available
Malaysia	-0,65	5,5	1,65	7,1	5,1	5,6	6,8	6,2	6,4
Myanmar	8,35	12,88	4,35	5,3	5,4	6,3	6,7	6,5	not available
Filipina	1,25	4,89	2,65	7,6	3,9	6,5	7,2	5,7	6,4
Singapura	2,05	6,36	0,5	14,8	5,1	1,2	3,7	4,9	2,1
Thailand	-3,05	5,05	0,1	7,8	-0,1	6,4	2,9	-2,1	0,4
Vietnam	5,3	7,64	5,8	6,8	5,9	5	5,42	4,96	5,25
ASEAN	-1,9	5,56	3,85	8,3	4,9	5,2	5,1	4,3	not available

(Sumber : IMF)

Negara-negara ASEAN-5 terkecuali Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2014 diatas ekspektasi. Malaysia yang diproyeksikan awal oleh Bank Negara Malaysia hanya mampu tumbuh 5,8% dan Filipina yang diproyeksikan awal oleh Banko Sentral ng Pilipinas hanya akan mampu tumbuh 5,7% ternyata keduanya mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan yaitu hingga 6,4%.

Negara-negara ini mendapatkan momentum perekonomiannya pada kuartal II-2104 melalui pertumbuhan yang dialami oleh sektor jasa dan sektor konstruksi berdampingan dengan Singapura yang mencatatkan pertumbuhannya melalui pertumbuhan pada sektor asuransi. Sementara hanya dalam jangka waktu tiga bulan pasca kudeta pihak militer, Thailand sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di kawasan telah mampu lepas dari jeratan resesi dengan kembali

mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif pada kuartal II-2014 setelah sebelumnya mengalami kontraksi -2,1%.

Pertumbuhan yang dialami Thailand ini didorong oleh membaiknya tingkat keseimbangan perdagangan internasional Thailand serta membaiknya sentimen investor yang kembali melakukan penanaman modal pada berbagai instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta. Sementara itu, pada kuartal II-2014, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh masih belum stabilnya tingkat kepercayaan dunia usaha terhadap perekonomian Indonesia atas dinamika situasi politik pasca pemilihan presiden baru.

Selain itu, pengetatan berbagai kebijakan moneter maupun fiskal yang salah satunya diwujudkan melalui penundaan kebijakan pembayaran gaji ke-13 pegawai negeri sipil oleh pemerintah dari awalnya pada kuartal II-2014 menjadi pada kuartal III-2014 yang menekan potensi pertumbuhan konsumsi masyarakat Indonesia pada kuartal berjalan turut memberikan dampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kontribusi pelaku ekonomi swasta menjadi kunci pertumbuhan ekonomi di negara utama kawasan. Momentum pertumbuhan ekonomi kuartal II-2014 sebagaimana yang dialami oleh Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand ditopang oleh pertumbuhan kinerja investasi swasta pada sektor jasa terutama pada sub-sektor yang terkait dengan perdagangan dan sektor konstruksi yang dilatarbelakangi oleh membaiknya situasi perekonomian global secara umum. Hal ini ditunjukkan dengan capaian pertumbuhan sektor konstruksi hingga sebesar dua digit pada Malaysia sebesar 12,1% dan Filipina sebesar 12,7%. Meningkatnya kontribusi pelaku ekonomi swasta ini menjadi semakin dominan karena pada saat yang bersamaan kontribusi pengeluaran pemerintah pada kuartal berjalan menunjukkan pelemahan diakibatkan *bottlenecking* pada rantai birokrasi.

Beberapa negara lainnya di kawasan ASEAN memerlukan percepatan restrukturisasi fundamental ekonomi agar mencapai potensi optimal pertumbuhan ekonominya. Brunei sebagai satu-satunya negara di kawasan yang mencatatkan kontraksi ekonomi sebesar -3,3% memerlukan restrukturisasi fundamental perekonomian dengan mempercepat diversifikasi sektor perekonomian yang saat ini sangat bergantung pada industri minyak bumi dan gas alam yang menurut Jabatan Perancang Kemajuan Ekonomi (JPKE) Brunei menguasai lebih kurang 70% PDB dan 90% total ekspor.

Ketergantungan pada sektor ini yang pada kuartal berjalan mencatatkan kontraksi -0,6% tengah dilakukan upaya pengalihan kepada sektor-sektor potensial Brunei lainnya seperti pertanian, perikanan dan kehutanan yang pada saat bersamaan mampu mencatatkan pertumbuhan hingga 4,1% *year-on-year*.

Permasalahan fundamental ekonomi lainnya seperti defisit anggaran pendapatan dan belanja negara yang terlalu besar dialami oleh Laos (5,8% terhadap PDB) dan Myanmar (3,7% terhadap PDB) akibat kebijakan perlindungan sosial yang terlalu ekspansif, rekrutmen pegawai negeri sipil secara besar-besaran dan anggaran pertahanan yang masih terlalu tinggi sehingga menyebabkan terbatasnya ruang fiskal pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk melakukan stimulus

perekonomian. Sementara itu, konflik perbatasan antara Vietnam dan mitra ekonomi utamanya, Tiongkok, membuat perekonomian Vietnam terhambat. Oleh karena itu, pemerintah Vietnam saat ini berusaha untuk melibatkan investor asing yang lebih beragam demi melepas ketergantungannya secara ekonomi kepada pemerintah Tiongkok.

Table 2
Inflasi ; Factor Pemicu Biaya

NEGARA	2011	2012	2013	Jul-14*
Brunei Darussalam	1,8	0,4	0,38	0,2
Kamboja	4,9	2,9	4,65	4,85
Indonesia	3,8	4,3	8,38	3,99
Laos	7,7	4,2	6,37	3,7
Malaysia	3	1,6	3,2	3,2
Myanmar	5,1	6,1	5	5,96
Filipina	4,2	3,1	4,1	4,9
Singapura	5,5	4,3	2,4	1,2
Thailand	3,5	3	2,18	2,09
Vietnam	18,1	6,81	6,04	4,31

(Sumber : Bloomber2)

Inflasi yang didorong oleh harga bahan makanan dan produk impor dihadapi dengan kebijakan beragam oleh negara-negara di kawasan. Secara umum negara-negara di kawasan ASEAN mencatatkan pembentukan inflasi tinggi yang disebabkan oleh meningkatnya harga bahan makanan dan minuman non-alkohol serta beberapa komponen konsumtif lainnya seperti garmen dan elektronik yang masih sangat bergantung pada aktivitas impor seiring dengan dibukanya berbagai fasilitas *Special Economic Zone*/Kawasan Ekonomi Khusus yang terutama terjadi pada negara-negara yang terletak di area Sungai Mekong (Kamboja, Laos dan Myanmar).

Tingkat inflasi yang relatif tinggi di sub-kawasan ini juga diperparah dengan adanya bencana banjir tahunan serta instabilitas politik yang sempat terjadi di Thailand sebagai kekuatan ekonomi utama di sub-kawasan sehingga menghambat arus lalu lintas perdagangan. Tingkat inflasi di beberapa negara bahkan mengalami tekanan lebih lanjut dengan terjadinya kenaikan harga layanan listrik sebesar 43% di Myanmar pada bulan April 2014 serta kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Vietnam sebanyak dua kali yaitu pada 26 Juni 2014 dan 7 Juli 2014.

Pengendalian inflasi pada negara-negara di kawasan tersebut sebagian besar dilakukan melalui kebijakan pengendalian harga sebagaimana yang diterapkan oleh pemerintah militer Thailand dan pemerintah Vietnam yang terbukti cukup efektif untuk mencegah tercapainya tingkat inflasi yang lebih tinggi lagi di tengah dinamika yang terjadi. Lain halnya dengan pemerintah Laos menempuh kebijakan penghapusan *Value Added Tax* (VAT) pada beberapa komoditi yang selama ini diimpor dengan harapan menumbuhkan produksi komersial secara domestik, kebijakan alternatif pengendalian inflasi juga dilakukan oleh pemerintah Brunei

sebagai negara dengan tingkat inflasi terendah pada kuartal berjalan dengan melakukan kebijakan pegging mata uang Dolar Brunei terhadap Dolar Singapura

2. **Pengangguran** Adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya . Ada 3 (Tiga) tipe pengangguran yaitu pertama , Pengangguran terbuka yang di sebabkan oleh Kurangnya pengetahuan , Kelesuan ekonomi , Kurangnya jiwa kewirausahaan kurangnya kesempatan berusaha Pengangguran terselubung , kedua Pengangguran terselubung yaitu perubahan orientasi padat karya menjadi padat modal (pergantian peran pekerjaan manusia oleh mesin), Perubahan kondisi organisasi , Perencanaan yg kurang matang (kesalahan dlm perekrutan) , ketiga Pengangguran musiman terjadi karena menunggu masa panen pada masyarakat desa (petani) . Jika berbagai jenis pengangguran tidak diatasi maka persoalan sosial yang akan timbul antara lain: Tingginya kesenjangan ekonomi , gangguan keamanan umum (kamtibmas) dan menjamurnya perumahan kumuh

Tabel 3
Pengangguran Negara ASEAN

Negara	Umur Pekerja (Tahun)	Tahun											
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
BRUNEI													
KAMBOJA													
INDONESIA	15+	9.9	11.2	10.3	9.1	8.4	7.9	7.1	6.6	6.1	6.2	5.9	
LAOS													
MALAYSIA	15-64	3.5	3.5	3.3	3.2	3.3	3.6	3.3	3.1	3	3.1	2.9	
MYANMAR													
PHILIPINA	15+	11.8	7.8	7.8	8.1	7.4	7.5	7.3	7	7	7.1	6.8	
SINGAPURA	15+	...	5.6	2.6	2.1	2.2	2.9	2.2	2	2	1.9	2	
THAILAND	15+	2.1	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.1	0.7	0.7	0.7	0.8	
VIETNAM	15+	-	-	-	-	-	-	4.3	4.5	2.7	2.8	2.5	

(sumber : BPS)

3. **Tanggungjawab sosial** yaitu Suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh

karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Program CSR dapat berwujud rekrutmen tenaga kerja dan mempekerjakan masyarakat sekitar. Lebih jauh lagi CSR dapat dipergunakan untuk menarik perhatian para calon pelamar pekerjaan, terutama sekali dengan adanya persaingan kerja di antara para lulusan, perusahaan merekrut tenaga kerja dari lulusan terbaik yang memiliki kesadaran sosial dan lingkungan.

CSR dapat juga digunakan untuk membentuk suatu atmosfer kerja yang nyaman di antara para staf, terutama apabila mereka dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang mereka percayai bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas, baik itu bentuknya "penyisihan gaji", "penggalangan dana" ataupun kesukarelawanan (*volunteering*) dalam bekerja untuk masyarakat

Skala dan sifat keuntungan dari CSR untuk suatu organisasi dapat berbeda-beda tergantung dari sifat perusahaan tersebut. Hasil Survey "The Millenium Poll on CSR" (1999) yang dilakukan oleh Environics International (Toronto), Conference Board (New York) dan Prince of Wales Business Leader Forum (London) di antara 25.000 responden dari 23 negara menunjukkan bahwa dalam membentuk opini tentang perusahaan, 60% mengatakan bahwa etika bisnis, praktik terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan, yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan paling berperan. Sedangkan bagi 40% lainnya, citra perusahaan & *brand image*-lah yang akan paling memengaruhi kesan mereka. Hanya 1/3 yang mendasari opininya atas faktor-faktor bisnis fundamental seperti faktor finansial, ukuran perusahaan, strategi perusahaan, atau manajemen.

4. **Pelestarian lingkungan hidup (*Environmentalisme*)** adalah filosofi, ideology dan gerakan sosial yang luas mengenai masalah konservasi lingkungan dan peningkatan kesehatan lingkungan. *Environmentalisme* mendukung pelestarian, restorasi dan / atau perbaikan lingkungan alam, dan dapat disebut sebagai sebuah gerakan untuk mengendalikan pencemaran atau melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Untuk alasan ini, konsep-konsep seperti etika lahan, etika lingkungan, keanekaragaman hayati, ekologi dan hipotesis *biophilia* hipotesis merupakan hal yang dominan.

Pada intinya, *environmentalisme* adalah upaya untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dan berbagai sistem alam di mana manusia bergantung sedemikian rupa sehingga semua komponen mendapat perlakuan yang sesuai untuk kelestariannya. Lingkungan hidup dan masalah lingkungan sering diwakili oleh warna hijau,

Melaksanakan Pembangunan ekonomi yang tentu saja bermakna industrialisasi, industrilaisasi berarti memiliki konsekuensi terhadap kerusakan, pencemaran lingkungan hidup, oleh karena nya perlu dilakukan

1. Pemanfaatan SDA untuk industri yang tidak terencana (eksploitasi) tentu akan mengurangi daya dukung alam dan lingkungan sebagai rumah hidup
2. Pencemaran udara, air dan tanah sebagai akibat industrilaisasi, greenhouse efect, pemanfatan chlorofourcarbon (CFC) dalam waktu yang lama akan berdampak pada :
 - a. Terganggunya kualitas kesehatan dan hidup mahlug
 - b. Mencairnya gunung es
 - c. Global warming
5. **Peningkatan mutu hidup.** konsep luas yang berhubungan dengan keseluruhan kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Konsep pendekatan melampaui kondisi hidup, yang cenderung berfokus pada sumber daya material (uang, akses terhadap barang dan jasa) yang tersedia untuk individu dan mempertimbangkan indikator seperti kebahagiaan, kebebasan untuk memilih gaya hidup seseorang dan subjektif kesejahteraan. Konsep ini demikian multi-dimensi, dan diukur oleh indikator objektif dan subjektif yaitu pertama, Mutu Hidup Politik; yang diwujudkan dalam pemenuhan hak-hak politik masyarakat (kebebasan berpendapat, berserikat, memilih dan di pilih, menyampaikan aspirasi dll), kedua, Mutu Hidup Ekonomi; Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang di indikasikan dengan penngkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup paling dasar (sandang, papan dan pangan)nya
6. **Penerapan norma-norma dan etika.** Gencar nya globalisasi akan berdampak pada maraknya masuknya nilai budaya luar akan menghilangkan nilai – nilai tradisi suatu bangsa dan identitas suatu bangsa. menggeser nilai – nilai sosial masyarakat, derajat manusia nantinya tidak dihargaikarena lebih banyak menggunakan mesin Mengakibatkan erosi terhadap nilai – nilai tradisi.
7. **Keanekaragaman tenaga kerja,** Para pendatang sebagai tenaga kerja, dimasa yang akan datang mobilitas manusia semakin tinggi, secara internal dalam suatu negara terdapat bermigras penduduk terutama dalam bentuk urbanisasi, pada tingkat global terdapat peningkatan imigrasi penduduk terutama dari negara berkembang ke negara-negara industri maju. Perpindahan tersebut tentunya menambah kerumitan keanekaragaman ketenagakerjaan dengan berbagai implikasinya. Sebagai implikasi dari keanekaragaman tenaga kerja yang harus ditangani yaitu : Perubahan dalam proses rekrutmen, Perubahan dalam proses seleksi, Kebijakann penempatan, Penugasan, Kebijakann kepesertaan pada program pelatihan dan pengembangan, Sistem imbalan, Pola pembinaan karier, Sistem promosi, Jam kerja dan praktek jam kerja lembur, Kebijakann cuti tahunan serta cuti di luar tanggungan. Ada 8 (delapan) profesi yang akan bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yaituru 1. Insinyur 2. Arsitek 3. Tenaga

- pariwisata 4. Akuntan 5. Dokter gigi 6. Tenaga survey 7. Praktisi medis dan 8. Perawat.
8. **Konfigurasi Demografi**, Pencapaian pembangunan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh proses pembangunan manusia. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari seberapa besar kualitas manusia di suatu wilayah. Indikator yang bisa mengukur kualitas manusia disuatu daerah yaitu dengan cara Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator yang di gunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM mempunyai tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Jadi ketiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan IPMnya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi satu sama yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.

Konfigurasi demografi menyangkut akan tiga hal, yakni; a. Penduduk yang belum waktunya memasuki lapangan pekerjaan (anak-anak yang masih dalam batasan umur belum boleh bekerja) b. Penduduk yang tergolong pada angkatan kerja, dan c. Penduduk yang tergolong purnakarya. Tantangan nya adalah, bagaimana untuk ke depannya organisasi harus mampu melihat akan hal ini di mana penduduk yang tergolong pada angkatan kerja/produktif harus menopang kehidupan penduduk yang masih belum waktunya memasuki lapangan pekerjaan dan penduduk yang sudah tidak produktif lagi (lanjut usia). Salah satu solusinya adalah meningkatkan system kompensasi kepada penduduk angkatan kerja tersebut.

Tabel 4.
Provinsi Dengan IPM Tertinggi di Indonesia

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	JUMLAH
Dki Jakarta	76.31	76.98	77.53	78.08	78.39	387.29
Daerah Istimewa Yogyakarta	75.37	75.93	76.15	76.44	76.81	380.70
Kalimantan Timur	71.31	72.02	72.62	73.21	73.82	362.98
Kepulauan Riau	71.13	71.61	72.36	73.02	73.40	361.52
Bali	70.10	70.87	71.62	72.09	72.48	357.16
Riau	68.65	68.90	69.15	69.91	70.33	346.94
Sulawesi Utara	67.83	68.31	69.04	69.49	69.96	344.63
Banten	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89	344.04
Sumatera Barat	67.25	67.81	68.36	68.91	69.36	341.69
Aceh	67.09	67.45	67.81	68.30	68.81	339.46

(sumber : Badan Pusat Statistik 2014)

Table 5
IPM Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota					JUMLAH
Kota Tangerang	73.69	74.15	74.57	75.04	75.87	373.32
Kota Cilegon	68.8	69.26	70.07	70.99	71.57	350.69
Kota Serang	68.25	68.69	69.43	69.69	70.26	346.32
Kab Tangerang	68.01	68.45	68.83	69.28	69.57	344.14
Kab Serang	60.96	61.97	62.97	63.57	63.97	313.44
Kota Tangerang Selatan	-	76.99	77.68	78.65	79.17	312.49
Kab Pandeglang	59.08	59.92	60.48	61.35	62.06	302.89
Kab Lebak	58.83	59.82	60.22	61.13	61.64	301.64
Provinsi Banten	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89	344.04

(sumber : Badan Pusat Statistik 2014)

9. **Penguasaan dan pemanfaatn IPTEK**, Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang wajib mengingat era pembangunan sudah memasuki era globalisasi yang sarat akan persaingan. Dalam persaingan, maka yang terbaiklah tentunya yang akan menang. menciptakan sesuatu yang terbaik dan lebih baik lagi tentunya adalah dengan teknologi yang semakin mutakhir. Mengembangkan suatu teknologi tentunya harus memiliki ilmu pengetahuan pula.
10. **Bidang Politik**. Dalam menjalankan suatu pembangunan, biasanya kental akan campur tangan politik dalam menentukan rioritas dan kebijakan. Bidang politik tentunya tidak saja hanya menyangkut partai politik, tetapi bagaimana menjalankan Negara ini kedepannya juga termasuk kajian politik. Hal ini tentunya dapat dicontohkan seperti pengaturan angkatan bersenjata dalam menjaga stabilitas ekonomi dan bahkan di beberapa Negara dimanfaatkan untuk membantu keamanan pembangunan suatu Negara.

Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

Keberhasilan pengelolaan penerimaan daerah hanya semata diukur dari jumlah penerimaan yang dapat dicapai, tetapi sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Secara teoritis kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi adalah upaya perluasan jenis pungutan.

Upaya ini harus dilakukan dengan hati - hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan ekonomi nasional. Upaya intensifikasi adalah upaya meningkatkan kemandirian penerimaan daerah dengan meningkatkan kinerja pajak dan retribusi daerah yang ada.

Upaya ini menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengidentifikasi secara sah potensi penerimaan daerah dan kemudian mampu memungutnya dengan berdasar pada asas manfaat dan asas keadilan. Lebih lanjut, untuk mencapai hal tersebut berbagai sumber daya (*software dan hardware*) yang digunakan untuk memungut dan strategi pemungutan perlu segera disiapkan.

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui penghitungan potensi dengan penyusunan sistem informasi basis data potensi.

Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas penerimaan daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Estimasi potensi melalui penyusunan basis data yang dibentuk dan disusun dari variabel-variabel yang merefleksikan masing-masing jenis penerimaan. (pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain) sehingga dapat menggambarkan kondisi potensi dari suatu jenis penerimaan.

Dalam jangka pendek upaya peningkatan penerimaan daerah hanya mampu meletakkan dasar-dasar yang mengarah pada penerimaan daerah yang “benar” dan mencerminkan fungsi pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan daerah yang tidak terarah dan benar (hanya bersifat jangka pendek dan untuk kepentingan kelompok tertentu) justru akan menjatuhkan kewibawaan pemerintah dan DPRD di mata publik yang pada gilirannya akan menurunkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Oleh karena itu penentuan potensi (penyusunan basis data potensi) setiap jenis penerimaan daerah secara benar dan penerapan sistem dan prosedur koleksi penerimaan daerah yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah setempat serta pengawasan yang benar-benar oleh DPRD akan mampu mengoptimisasi peningkatan penerimaan daerah.

Table 6
Pendapatan Kabupaten Dan Kota se - Indonesia
Tahun 2010 s.d 2014

NO	JENIS PENDAPATAN	TOTAL PENDAPATAN	RATA-RATA	%
	Pendapatan daerah	2,217,146,519,083	443,429,303,817	100%
1	pendapatan Asli Daerah	164,961,612,584	32,992,322,517	7%
2	Dana Perimbangan	1,676,737,659,489	335,347,531,898	76%
3	lain-lain pendapatan yang sah	375,447,247,010	75,089,449,402	17%

(sumber : diolah dari data BPS 2014)

Table 7
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Se Indonesia
Tahun 2010 s.d 2014

NO	PENDAPATAN ASLI DAERAH	TOTAL PENDAPATAN	RATA-RATA	%
1	Pajak Daerah	66,160,558,125	13,232,111,625	40%
2	Retribusi Daerah	26,116,844,505	5,223,368,901	16%
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan	40,682,465,731	8,136,493,146	25%
4	Lain-lain PAD yang Sah	64,765,468,509	12,953,093,702	39%

(sumber : diolah dari data BPS Pusat 2014)

Table 8
Dana Perimbangan kabupaten dan Kota Se Indonesia
Tahun 2010 s.d 2014

NO	JENIS DANA PERIMBANGAN	TOTAL PENDAPATAN	RATA-RATA	%
1	Bagi Hasil Pajak	132,182,507,814	26,436,501,563	8%
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	201,930,050,290	40,386,010,058	12%
3	Dana Alokasi Umum	1,213,501,431,147	242,700,286,229	72%
4	Dana Alokasi Khusus	129,123,670,238	25,824,734,048	8%
	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	0%

(sumber : diolah dari data BPS Pusat 2014)

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah se Indonesia dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan yaitu Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan yaitu Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif khususnya tarif retribusi.
3. Peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah yaitu Kapasitas pengelola penerimaan daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui
 - a. Menyeimbangkan kebutuhan pengelola secara kualitatif dan kuantitatif,
 - b. Penerimaan tenaga pengelola.
 - c. Pelatihan tenaga pengelola
 - d. Penetapan kinerja tenaga penglola
 - e. Pemenuhan aspek kesejahteraan tenaga pengelola (gaji, upah pungut, karir dan sistem pensiun).
4. Meningkatkan pengawasan Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain.
 - a. Pengawasan terencana.
 - b. Inspeksi mendadak.
 - c. Konsistensi penerapan sanksi.
5. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
6. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
7. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi Perlu dilakukan penumbuhan kesadaran bahkan kebanggaan WP/WR membayar pajak/retribusi sebagai andil mereka membangun daerahnya. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah
 - a. Melalui pendekatan persuasif-partisipatif,
 - b. Melakukan penyuluhan pajak dan retribusi,
 - c. Pelaksanaan pelayanan prima.
8. Memetakan potensi penerimaan

Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan sumber penerimaan yang berasal dari pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, serta kontribusinya terhadap keungan clan perekonomian daerah. Upaya ini dilakukan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan cara menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri, khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyelenggaraan otonomi daerah akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Potensi ekonomi daerah sangat menentukan dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah tangganya.

Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya semata diukur dari jumlah penerimaan daerah yang dapat dicapai tetapi lebih dari itu yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

III. SIMPULAN

ASEAN sebagai sebuah organisasi regional menyadari pentingnya suatu integrasi kawasan. Sejalan dengan hal tersebut, para wakil ASEAN membuat *ASEAN Visions 2020* yang berdasar pada tiga pilar yaitu keamanan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Terdapat tiga komunitas dalam *ASEAN Community* yang sesuai dengan tiga pilar dari *ASEAN Vision 2020*, yaitu pada bidang keamanan politik (*ASEAN Political-Security Community*), ekonomi (*ASEAN Economic Community*), dan sosial budaya (*ASEAN Socio-Culture Community*)

Globalisasi merupakan tantangan terbesar bagi semua Negara, dan diperlukan memperhitungkan tantangan tersebut. Ada 10 tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia Tantangan globalisasi ekonomi , Pengangguran Tanggungjawab social, Pelestarian lingkungan hidup, Peningkatan mutu hidup, Penerapan norma-norma moral dan etika Keanekaragaman tenaga kerja Konfigurasi demografi, Penguasaan dan pemanfaatan IPTEK dan tantangan bidang politik

Adapun strategi peningkatan pajak daerah dengan cara memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah, meningkatkan pengawasan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi, dan memetakan potensi penerimaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basu Swasta, 1999, *Pengantar Bisnis Modern, Liberty, Jogjakarta*
Budi , Winarno 2008 *globalisasi peluang atau ancaman bagi indonesia. Jakarta: Erlanga*
Michael.P. Todaro 2006 *Pembangunan Ekonomi 1 Jakarta: Erlangga*
The Marshall Plan was replaced by the Mutual Security Plan at the end of 1951. Mills, Nicolaus (2008). *Winning the peace: the Marshall Plan and*

America's coming of age as a superpower. Wiley. p. 195. ISBN 978-0-470-09755-7.

Malcom Waters 1995. *Globalizations*. London: Routledge.

Sunaryati hartono, 1998, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN-Binacipta, Jakarta

Badan pusat statistic pusat

www.lombokpost.net/.../pertumbuhan-ekonomi-asean

<http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>

<http://www.scribd.com/doc/33883371/Globalisasi-Dalam-Kehidupan-Bermasyarakat>

<http://fik-hi.blogspot.com/2009/12/pentingnya-globalisasi-bagi-indonesia.html>

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, 2009, h. v <ditjenkpi.depdag.go.id> diakses 2 Januari 2012

¹ Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 7

¹ Departemen Perdagangan Republik Indonesia, v

¹ Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 16

¹ Departemen Perdagangan Republik Indonesia, vi